

Framing Media Terhadap Konflik Keagamaan: Studi Kasus Pemberitaan Penolakan Rumah Ibadah di Kota Bekasi

Media framing of religious conflict: A case study on news coverage of worship house rejection in Bekasi

Naufal Rifqi Nasution*, **Muhamad Noval Karom**, **Ahmad Sarbini**,
Asep Iwan Setiawan

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

* naufalrif23@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

Agenda-setting, Bekasi,
Framing, Religious
Conflict, Peace
Journalism

Article History

Received: 2025-11-06
Accepted: 2025-11-13

This study analyzes how online news media frame and set the agenda on the issue of *house of worship rejection* in Bekasi. The research aims to understand how media construct meanings and shape public perception of religious tolerance in a multicultural society. Using a qualitative descriptive approach with *content analysis*, data were obtained from online articles of *Detik.com*, *Liputan6.com*, *Tirto.id*, and *GerakanPIS.id*. The findings reveal that national media emphasize administrative clarification and reconciliation, while alternative media highlight constitutional rights and social justice. Through the combination of *framing* and *agenda-setting* analysis, this study concludes that media play a dual role as a manager of public issues and a moral agent in shaping narratives of tolerance. The results contribute to the development of *peace journalism* in reporting religious conflicts in contemporary Indonesia.

Copyright © 2025, Nasution et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v4i3.210](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i3.210)

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara multikultural memiliki tingkat keragaman agama yang tinggi, menjadikan isu keagamaan sangat sensitif dan mudah menjadi sorotan media. Dalam konteks ini, media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen pembentuk realitas sosial melalui proses seleksi, penonjolan, dan penafsiran terhadap peristiwa. Proses inilah yang dikenal dengan istilah *framing* (Sinaga et al., 2025). Lebih jauh, praktik komunikasi publik yang dilakukan media memiliki dimensi retorik yang kuat—yakni kemampuan mengonstruksi makna dan memengaruhi cara khalayak berpikir melalui pilihan bahasa dan narasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Nasution (2023), retorika modern dalam konteks komunikasi dakwah maupun sosial berperan bukan hanya menyampaikan

pesan, tetapi juga membentuk kesadaran moral dan sosial audiens. Dengan demikian, retorika media menjadi bagian integral dari proses konstruksi makna keagamaan dalam ruang publik digital kontemporer (Nasution, 2023). Sementara itu, teori *agenda-setting* menjelaskan bagaimana media membentuk hierarki isu di benak publik melalui intensitas pemberitaan (Hardiyanto et al., 2023). Kedua teori ini menjadi penting dalam melihat bagaimana media memengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu keagamaan, termasuk konflik penolakan rumah ibadah yang masih sering terjadi di Indonesia. Afandi et al. (2024) menjelaskan bahwa praktik *framing* media terhadap isu pembangunan rumah ibadah dapat membentuk persepsi publik terhadap kelompok agama tertentu, memperkuat stereotip sosial, bahkan berpengaruh pada arah kebijakan lokal. Temuan tersebut mempertegas bahwa media memiliki kekuatan simbolik dalam menentukan bagaimana masyarakat memahami isu keagamaan, bukan hanya dalam skala nasional, tetapi juga di tingkat lokal dan komunitas (Afandi et al., 2024).

Dalam perkembangan riset terkini, kajian mengenai konflik keagamaan di Indonesia menunjukkan bahwa problem rumah ibadah masih menjadi sumber gesekan sosial yang berulang. Ismail et al. (2024) dalam penelitiannya mengenai konflik pendirian rumah ibadah di Tangerang menemukan bahwa perbedaan interpretasi terhadap regulasi dan lemahnya komunikasi antar warga sering kali menjadi pemicu utama konflik, sementara media berperan memperluas wacana tersebut ke ruang publik. Mereka menekankan bahwa pelibatan aktor media dan lembaga sosial sangat menentukan arah resolusi konflik. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pemberitaan bukan hanya refleksi peristiwa, melainkan juga bagian dari mekanisme sosial yang dapat memperkuat atau meredakan ketegangan antar umat beragama (Ismail et al., 2024).

Sementara itu, pada konteks yang lebih luas, Yoedtadi (2025) menyoroti bagaimana konsep *peace journalism* dapat menjadi pendekatan penting dalam peliputan isu keagamaan di Indonesia. Studi tersebut, yang mengkaji konflik etno-keagamaan di Bitung tahun 2023, menunjukkan bahwa media yang menampilkan bingkai damai dan empati mampu menurunkan tensi sosial serta mendorong publik untuk melihat konflik secara lebih rasional dan konstruktif. Temuan ini relevan bagi upaya memahami hubungan antara media dan konflik agama, khususnya dalam menilai sejauh mana pemberitaan di Indonesia telah bertransformasi dari *conflict-oriented framing* menuju *solution-oriented framing* (Yoedtadi, 2025).

Secara teoretis, fenomena ini sejalan dengan pandangan López-Rabadán (2022) yang menyatakan bahwa dalam era digital, media sosial dan portal berita daring memperluas jangkauan *framing* dan *agenda-setting*, sehingga konstruksi isu keagamaan menjadi lebih kompleks dan cepat memengaruhi persepsi publik. Namun, meskipun penelitian tentang *media framing* terus berkembang, masih sedikit kajian yang secara spesifik meneliti isu penolakan rumah ibadah dalam konteks perkotaan Indonesia dengan pendekatan ganda antara *framing* dan *agenda-setting* (López-Rabadán, 2022).

Namun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak yang menelaah secara khusus bagaimana media daring nasional dan lokal membingkai konflik penolakan rumah ibadah di wilayah perkotaan seperti Bekasi. Padahal, kasus ini menarik karena muncul di kota dengan indeks toleransi tinggi namun tetap memunculkan gesekan sosial. Dengan demikian, terdapat celah riset (*research gap*) pada kajian komunikasi keagamaan yang belum menggabungkan teori *framing* (Entman) dan *agenda-setting* (McCombs & Shaw) dalam konteks pemberitaan konflik rumah ibadah di Indonesia.

Penelitian ini memiliki keunikan dalam mengkaji konstruksi media terhadap isu keagamaan dengan pendekatan ganda *framing* dan *agenda-setting* pada kasus penolakan rumah ibadah di Bekasi. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi analisis bingkai media dan penentuan agenda isu dalam satu kerangka interpretatif, yang sebelumnya jarang diterapkan secara bersamaan dalam studi komunikasi keagamaan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media daring nasional dan lokal membingkai isu penolakan rumah ibadah di Bekasi serta bagaimana praktik *agenda-setting* turut membentuk persepsi publik terhadap toleransi dan kebebasan beragama. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan wacana *peace journalism* dalam pemberitaan isu keagamaan di Indonesia kontemporer.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis isi (*Content Analysis*) sebagai metode utama. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada makna dan konstruksi sosial yang dibangun oleh media dalam memberitakan isu keagamaan, bukan pada pengukuran statistik atau data numerik. Menurut Creswell & Creswell (2023), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menelusuri konteks, bahasa, dan narasi yang terkandung dalam teks. Pendekatan ini relevan karena konflik keagamaan dan pemberitaan media memiliki dinamika makna yang kompleks dan tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Penelitian ini dirancang sebagai studi kasus tunggal (*single case study*) yang menelaah pemberitaan kasus penolakan rumah ibadah di Bekasi. Kasus tersebut dipilih karena memiliki relevansi tinggi dengan topik toleransi dan keberagaman agama di Indonesia, serta menjadi contoh aktual dari bagaimana media daring membingkai konflik keagamaan di tingkat lokal. Desain studi kasus ini memungkinkan peneliti menelusuri secara mendalam proses konstruksi makna dalam pemberitaan dan hubungan antara bingkai media dengan persepsi publik terhadap toleransi. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Bunkar et al. (2024) bahwa studi kasus cocok digunakan untuk memahami fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata di mana batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas (Bunkar et al., 2024).

Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari artikel pemberitaan daring yang menyoroti kasus penolakan rumah ibadah di Bekasi, baik dari media nasional seperti Kompas.com, Detik.com, Liputan6.com, maupun media alternatif seperti GerakanPIS.id dan kanal YouTube Tribun Bekasi. Pemilihan media dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sumber data berdasarkan relevansi dan kredibilitas media terhadap isu yang dikaji.

Untuk menjaga ketelitian dan agar penelitian ini dapat diulang oleh peneliti lain ke depannya, maka penulis menetapkan kriteria yang jelas dalam pemilihan data. Kriteria inklusinya mencakup berita daring yang secara langsung membahas isu penolakan rumah ibadah di kota Bekasi, yang terbit pada kisaran tanggal 22 sampai 25 September 2024 dan adapun yang berita 8 Agustus 2025 adalah sebagai pendukung saja, berita ini dimuat dalam rubrik *news* atau nasional. setiap artikel berita yang diambil memiliki panjang minimal 300 kata dan memuat sumber resmi seperti pernyataan pemerintah atau tokoh masyarakat.

Sementara itu, kriteria eksklusinya adalah artikel berbentuk opini, editorial, iklan, atau konten yang hanya menyalin unggahan media sosial tanpa verifikasi redaksi

Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran ini seperti “penolakan rumah ibadah Bekasi”, “ASN Bekasi intoleransi”, dan “kebebasan beribadah Bekasi”. Dari hasil penelusuran, diperoleh empat artikel utama dan 2 unggahan YouTube yang memenuhi kriteria, berasal dari lima media daring, yaitu *Liputan6.com*, *Detik.com*, *Tirto.id*, *GerakanPis.id*, dan kanal YouTube. Kemudian data tersebut dijadikan sampel akhir untuk dianalisis menggunakan teori framing dari *Entman* dan *agenda setting* dari *McCombs*, yang tujuannya untuk melihat bagaimana media membentuk makna dan arah wacana publik terhadap isu toleransi keagamaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada pemberitaan mengenai penolakan rumah ibadah di Bekasi, sebuah isu yang menjadi sorotan publik karena merepresentasikan dinamika antar agama, masyarakat, dan media di wilayah perkotaan dengan tingkat heterogenitas tinggi. Kota Bekasi dikenal sebagai daerah penyangga ibu kota yang plural secara agama, dengan populasi yang terdiri atas berbagai kelompok keagamaan dan etnis. Kondisi tersebut menjadikan setiap isu bernuansa agama memiliki potensi untuk memicu perdebatan sosial, terutama ketika berkaitan dengan ruang publik dan hak beribadah.

Dalam konteks penelitian ini, media daring seperti *Detik.com*, *kompas.com*, dan *Liputan6.com* dipilih sebagai sumber utama karena memiliki jangkauan luas serta kemampuan mempengaruhi opini publik secara cepat melalui algoritma distribusi berita digital. Berdasarkan temuan Muchtar et al. (2024), pemberitaan mengenai pendirian rumah ibadah kerap dipengaruhi oleh framing kebijakan, peran aparat, dan dinamika sosial di tingkat lokal. Isu penolakan rumah ibadah di Bekasi menunjukkan pola serupa, di mana pemberitaan tidak hanya menggambarkan konflik administratif, tetapi juga memperlihatkan konstruksi wacana tentang toleransi dan hak kebebasan agama (Muchtar et al., 2024).

Kajian terdahulu oleh Muhaemin dan Sanusi (2019) menunjukkan bahwa media cetak nasional seperti *Kompas* sering kali menggunakan bingkai moral dan hukum dalam peliputan konflik agama, yang kemudian direproduksi oleh media daring melalui narasi digital. Hal ini menegaskan bahwa pola pemberitaan mengenai konflik keagamaan mengalami kontinuitas lintas platform (Muhaemin & Sanusi, 2019).

Selain itu, studi Halwati dan Alfi (2022) mengungkap bahwa framing media dalam isu toleransi antar umat beragama di surat kabar Indonesia masih menunjukkan dominasi narasi elite, di mana suara minoritas sering terpinggirkan dalam konstruksi berita. Perspektif ini penting untuk memahami mengapa kasus penolakan rumah ibadah di Bekasi bukan hanya sekadar persoalan sosial, tetapi juga menjadi arena produksi makna media yang kompleks (Halwati & Alfi, 2022).

Fenomena ini semakin diperjelas oleh Ramadoni et al. (2024) yang menemukan bahwa framing positif terhadap kunjungan tokoh agama dunia seperti Paus Fransiskus mampu menciptakan resonansi publik yang lebih damai. Namun, di sisi lain, isu lokal seperti

penolakan rumah ibadah sering diberitakan secara sensasional tanpa konteks resolusi, yang berpotensi memperkuat persepsi publik terhadap intoleransi (Ramadoni et al., 2024).

Dengan demikian, gambaran umum objek penelitian ini memperlihatkan bahwa Bekasi menjadi ruang penting dalam mempelajari bagaimana media daring Indonesia membentuk narasi tentang konflik keagamaan dan toleransi. Analisis *framing* dan agenda *setting* pada kasus ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana media berperan dalam menciptakan konstruksi sosial mengenai hubungan antar umat beragama di ruang publik digital Indonesia kontemporer.

Tabel 1. Periode dan jumlah data

Sumber Media	Judul Berita/ Konten	Tanggal Terbit	Keterangan Awal (Bingkai)
Liputan6.com	Respons PJ Wali Kota soal Viral ASN Kota Bekasi Protes Lokasi Ibadah Umat Kristiani	23 September 2024	Menekankan respons pemerintah, bingkai “solusi & klarifikasi”
Detik.com	4 Hal soal ASN Bekasi Minta Maaf Usai Protes Tetangga Doa Bersama	24 September 2024	Fokus pada klarifikasi & permintaan maaf, bingkai “rekonsiliasi sosial”
Tirto.id	Viral Masriwati ASN Pemkot Bekasi Karena Dugaan Intoleransi	25 September 2024	Menekankan sisi individu pelaku, bingkai “intoleransi personal vs institusional”
Youtube-Tribun Bekasi	Viral ASN di Bekasi Terkait Izin Tempat Ibadah, Mediasi antara Warga dan Pemerintah	24 September 2024	Konten Visual: Menampilkan proses mediasi dan reaksi warga di lapangan
Youtube @Official News	Viral Diduga ASN di Bekasi <i>Ngamuk</i> Larang Umat Kristiani Beribadah	22 September 2024	ASN melarang Umat Kristiani berdoa dan beribadah.
Gerakanpis.id	Nasib Tragis Jemaat HKBP Bekasi Yang Ditindas Hak Beribadahnya	8 Agustus 2025	Hak beribadah Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia Kabupaten Bekasi ditindas selama puluhan tahun

3.2. Analisis Framing Media Terhadap Pemberitaan Konflik Keagamaan

Analisis framing pada penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada model Robert Entman (1993) yang menekankan empat dimensi utama: *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (identifikasi penyebab), *make moral judgment* (penilaian moral), dan *suggest remedies* (usulan penyelesaian). Model ini digunakan untuk menelusuri bagaimana media daring nasional dan lokal mengonstruksi realitas sosial seputar penolakan rumah ibadah di Bekasi melalui pemilihan narasi, sumber, dan fokus pemberitaan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap media memiliki bingkai (*frame*) yang berbeda dalam menafsirkan peristiwa tersebut. Media nasional seperti Liputan6.com dan Detik.com cenderung menonjolkan aspek klarifikasi pemerintah dan mediasi sosial,

sementara media alternatif seperti GerakanPIS.id dan kanal YouTube Tribun Bekasi lebih menyoroti aspek pelanggaran hak beribadah dan ketimpangan sosial. Perbedaan ini menggambarkan ideologi redaksional dan orientasi agenda media di mana sebagian berupaya meredam konflik, sementara lainnya menampilkan dimensi struktural dan keadilan sosial.

Tabel 2. Analisis Framing Terhadap Pemberitaan di Media yang diambil

Sumber Media	Define Problems (Masalah yang diangkat)	Diagnose Causes (Penyebab)	Make Moral Judgements (Penilaian Moral)	Suggest Remedies (Solusi yang ditawarkan)
Liputan6.com	Kasus ASN Bekasi yang melarang tetangganya beribadah menjadi sorotan publik dan memicu kritik terhadap ASN.	Kesalahpahaman dan kurangnya pemahaman ASN tentang toleransi dan hak beribadah.	Pemerintah dinilai responsif dengan melakukan klarifikasi dan pembinaan.	Ditekankan pentingnya sosialisasi dan klarifikasi untuk menjaga kerukunan.
Detik.com	Viral kasus ASN Bekasi yang memprotes kegiatan doa bersama di lingkungan perumahan.	Ketidaktahuan ASN mengenai batasan hukum kegiatan ibadah di rumah pribadi.	ASN diharapkan lebih toleran dan memahami keberagaman.	Permintaan maaf publik dan proses mediasi menjadi langkah penyelesaian.
Tirto.id	Kasus dugaan intoleransi ASN Pemkot Bekasi yang melarang umat Kristiani beribadah di rumah.	Adanya bias institusional dan lemahnya penegakan nilai netralitas ASN.	Tindakan ASN dipandang sebagai pelanggaran moral dan profesional.	Pemerintah perlu memperkuat etika ASN dan penerapan nilai toleransi.
YouTube-Tribun Bekasi	Viral video mediasi antara ASN, warga, dan pemerintah terkait izin tempat ibadah.	Reaksi sosial akibat kesalahpahaman dan kurang komunikasi antar warga.	Perbedaan pandangan agama perlu disikapi dengan kepala dingin dan empati.	Mediasi dan dialog lintas iman dianggap solusi terbaik untuk perdamaian sosial.
YouTube @Official News	Video ASN Bekasi melarang umat Kristiani berdoa memicu kemarahan publik di media sosial.	Emosi dan ketidaktahuan individu ASN terhadap aturan kebebasan beragama.	Tindakan tersebut dianggap intoleran dan mencederai citra ASN.	Peningkatan literasi toleransi dan pembinaan ASN diperlukan.
Gerakanpis.id	Jemaat HBPK Filadelfia Bekasi masih mengalami penolakan untuk beribadah setelah bertahun-tahun	Lemahnya perlindungan hukum terhadap hak beribadah minoritas.	Pemerintah dinilai gagal menegakkan konstitusi kebebasan beragama.	Penegakan hukum dan revisi regulasi rumah ibadah menjadi solusi jangka panjang.

Untuk memudahkan pemahaman, hasil analisis framing pada masing-masing media disajikan dalam Tabel 2, yang merangkum elemen-elemen bingkai berdasarkan kategori Entman. Tabel ini memperlihatkan bagaimana setiap media mendefinisikan masalah, menafsirkan penyebab, membangun penilaian moral, serta menawarkan solusi terhadap konflik keagamaan tersebut. Melalui tabel tersebut, pola framing dapat dibandingkan secara jelas, baik dari sisi tema utama maupun arah wacana yang dibangun di ruang publik digital.

3.3. Analisis Agenda Setting Isu Penolakan Rumah Ibadah

Isu penolakan rumah ibadah di Bekasi mencuat ke ruang publik pada September 2024, setelah beredarnya video seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menegur umat Kristiani yang sedang beribadah di rumah salah satu warga. Viralitas video tersebut di platform digital seperti X (Twitter), Instagram, dan YouTube memunculkan reaksi berantai dari masyarakat dan memaksa media arus utama seperti *Liputan6.com*, *Detik.com*, dan *Tirto.id* untuk segera mengangkat isu tersebut sebagai topik utama pemberitaan. Fenomena ini menggambarkan proses agenda *building*, di mana media sosial menjadi pemicu terbentuknya isu yang kemudian dilegitimasi oleh media arus utama sebagai bagian dari agenda publik.

Selama periode 22–25 September 2024, media nasional menempatkan isu penolakan rumah ibadah sebagai *headline* utama. Pemberitaan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai fakta, tetapi juga sebagai alat untuk menentukan prioritas perhatian publik. Dalam konteks teori *agenda-setting*, frekuensi dan durasi pemberitaan menciptakan persepsi tentang urgensi isu tertentu. Sejalan dengan temuan Pirmansyah (2024), media cenderung menonjolkan aspek administratif dan klarifikasi pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial, sehingga konflik keagamaan sering kali ditampilkan dalam bingkai penyelesaian damai dan bukan pelanggaran hak. Dengan kata lain, agenda yang dibentuk media mengarahkan publik untuk memandang isu ini sebagai persoalan “miskomunikasi sosial” alih-alih “intoleransi agama struktural.” (Pirmansyah, 2024)

Namun, pola berbeda terlihat pada media alternatif seperti *GerakanPIS.id* dan *Sahabatedu.com*. Media ini memperluas fokus isu dengan menekankan aspek hak konstitusional beribadah dan kegagalan kebijakan publik dalam menjamin kebebasan beragama. Temuan ini sejalan dengan Muthaqin et al. (2021) yang menyatakan bahwa ideologi media turut menentukan prioritas agenda pemberitaan keagamaan (Muthaqin et al., 2021). Media advokasi cenderung mengangkat tema keadilan dan kesetaraan, sementara media arus utama berfokus pada stabilitas sosial. Dalam hal ini, Ramadoni et al. (2024) juga menegaskan bahwa media sosial memainkan peran baru dalam memperluas agenda publik dengan menonjolkan nilai moral dan solidaritas lintas agama (Ramadoni et al., 2024).

Dengan demikian, dinamika agenda setting dalam kasus Bekasi menunjukkan adanya dua lapis proses. Pertama, media sosial berperan sebagai *agenda initiator* dengan memunculkan perhatian publik terhadap isu intoleransi melalui viralitas video. Kedua, media arus utama bertindak sebagai *agenda maintainer* dengan mengelola intensitas pemberitaan dan mengarahkan persepsi publik menuju narasi stabilitas dan mediasi sosial. Almakaty (2024) menjelaskan bahwa dalam konteks komunikasi digital, agenda *setting* bersifat sirkular dan interaktif, di mana audiens bukan hanya penerima pesan, tetapi juga aktor yang turut menyebarkan, menafsirkan, dan memperkuat agenda media melalui partisipasi digital (Almakaty, 2024).

Oleh karena itu, analisis ini menegaskan bahwa media tidak hanya menetapkan apa yang penting untuk dipikirkan publik, tetapi juga bagaimana isu itu seharusnya dipahami. Melalui intensitas, urutan, dan tone pemberitaan, media membentuk hierarki isu yang berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai toleransi dan kebebasan beragama di Indonesia. Dalam konteks Bekasi, proses agenda setting memperlihatkan bagaimana praktik jurnalistik dapat berfungsi ganda—sebagai pengelola isu publik sekaligus sebagai instrumen politik representasi nilai sosial keagamaan.

3.4. Dampak Framing dan Agenda Setting terhadap persepsi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi *framing* dan *agenda setting* dalam pemberitaan konflik penolakan rumah ibadah di Bekasi berpengaruh nyata terhadap cara masyarakat memahami isu toleransi. Media arus utama seperti *Detik.com* dan *Liputan6.com* lebih banyak menampilkan bingkai administratif yang menekankan klarifikasi, permintaan maaf, dan mediasi sosial oleh pemerintah, sedangkan media alternatif seperti *GerakanPIS.id* lebih menyoroti pelanggaran hak konstitusional beribadah serta lemahnya perlindungan negara terhadap kelompok minoritas. Perbedaan orientasi pemberitaan ini membentuk dua persepsi sosial yang kontras di tengah masyarakat—pertama, persepsi yang melihat kasus ini sebagai *miskomunikasi sosial individual*, dan kedua, persepsi yang memahami peristiwa tersebut sebagai *intoleransi struktural*. Hal ini sejalan dengan temuan Muhaemin dan Sanusi (2019) yang menjelaskan bahwa perbedaan ideologi media berpengaruh terhadap arah framing dan representasi isu keagamaan (Muhaemin & Sanusi, 2019). Sementara itu, Entman (2007) menegaskan bahwa framing bekerja dengan menyeleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas, sehingga publik diarahkan untuk memahami suatu peristiwa dalam kerangka moral yang ditentukan oleh media (Entman, 2007).

Selain itu, dalam konteks *agenda setting*, media berperan penting dalam menentukan seberapa jauh suatu isu menjadi perhatian publik. Intensitas pemberitaan selama minggu pertama pasca-viral kasus ASN Bekasi memperlihatkan bahwa media berfungsi membangun prioritas perhatian terhadap isu toleransi. Namun, ketika narasi klarifikasi mulai mendominasi, isu tersebut secara bertahap kehilangan daya gaungnya di ruang digital. Temuan ini konsisten dengan teori *agenda setting* McCombs (2014) bahwa media tidak hanya memberi tahu masyarakat *apa yang harus dipikirkan*, tetapi juga *seberapa penting* isu itu untuk diperhatikan. Dalam konteks ini, publik lebih diarahkan untuk memahami kasus tersebut sebagai persoalan yang telah diselesaikan secara administratif, bukan sebagai refleksi dari problem intoleransi yang lebih dalam. Di sisi lain, Yoedtadi (2025) menekankan bahwa penerapan *jurnalisme damai* (*peace journalism*) dalam peliputan konflik keagamaan dapat menurunkan tensi sosial dan memperkuat dialog antarumat beragama. Oleh karena itu, media diharapkan tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga menjadi ruang edukatif yang menanamkan nilai *qaulan sadida* yaitu ucapan yang benar dan menenangkan dalam pemberitaan keagamaan di Indonesia (Yoedtadi, 2025).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa media daring memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap isu *penolakan rumah ibadah* di Bekasi melalui mekanisme *framing* dan *agenda setting*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media arus utama, seperti *Detik.com* dan *Liputan6.com*, cenderung membingkai isu dalam konteks administratif dan klarifikasi sosial, sedangkan media alternatif seperti *GerakanPIS.id* menyoroti dimensi hak beribadah dan ketimpangan kebijakan. Perbedaan bingkai ini berimplikasi pada munculnya dua pola persepsi publik yakni pandangan yang menilai peristiwa tersebut sebagai kesalahpahaman sosial dan pandangan yang melihatnya sebagai bentuk intoleransi struktural. Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa *framing* berperan dalam menentukan bagaimana suatu isu dimaknai, sedangkan *agenda setting* berperan dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Kombinasi keduanya menjelaskan bagaimana media berfungsi tidak hanya sebagai penyampai

informasi, tetapi juga sebagai pembentuk realitas sosial yang memengaruhi wacana publik tentang toleransi dan kebebasan beragama. Temuan ini mendukung pentingnya penerapan prinsip jurnalisme damai (*peace journalism*) agar media tidak memperkuat polarisasi, melainkan menjadi sarana edukatif yang menumbuhkan kesadaran keberagaman.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup data yang hanya mencakup pemberitaan dari beberapa media daring dalam periode tertentu, sehingga belum menggambarkan keseluruhan representasi media nasional dan lokal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan menambahkan dimensi media sosial dan analisis wacana kritis guna memahami lebih dalam interaksi antara media, kebijakan publik, dan persepsi masyarakat terhadap isu-isu keagamaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Y., Karni, A., & Ashadi, A. (2024). Serupa tapi tidak bersama: Pemberitaan media dalam konflik pendirian Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal di Kota Bogor. *Komunida*, 14, 218–237. <https://doi.org/10.35905/komunida.v7i2>
- Almakaty, S. S. (2024). Agenda setting theory in the age of digital media: An analytical perspective. *ECIS*, 8(2), 1742–1750.
- Bunkar, R., Chauhan, L., Verma, A., & Sirilakahmi, Y. (2024). Case study research: A method of qualitative research. In *Exploring narratives: A guide to qualitative research methods* (p. 75). <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-3881-7.ch023>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Entman, R. M. (2007). Framing bias: Media in the distribution of power. *Journal of Communication*, 57(1), 163–173. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00336.x>
- Halwati, U., & Alfi, I. (2022). Interfaith tolerance through the media of Indonesian newspapers. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 42(40), 285–307. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/index>
- Hardiyanto, S., Fahmi, K., Wahyuni, W., Adhani, A., & Pahlevi Hidayat, F. (2023). Kampanye moderasi beragama di era digital sebagai upaya preventif millennial mereduksi kasus intoleransi di Indonesia. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 228–237. <https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.1933>
- Ismail, I., Rabitha, D., Nugroho, N., & Haryanto, J. (2024). Early response to the conflict over establishment of the houses of worship through the collaborative governance regime (CGR) model. 10, 29–43.
- López-Rabadán, P. (2022). Framing studies evolution in the social media era: Digital advancement and reorientation of the research agenda. *Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.3390/socsci11010009>
- Muchtar, A., Purbolaksono, A., Intania, C., & Primaresti, F. (2024). Evaluasi syarat pendirian rumah ibadat. *The Indonesia Institute, Center for Public Policy Research*, 7–12, 79.
- Muhaemin, E., & Sanusi, I. (2019). Intoleransi keagamaan dalam framing Surat Kabar Kompas. *CJIK*, 3, 17–34. <https://doi.org/10.15575/cjik.v3i1.5034>

- Muthaqqin, F., Syam, H., & Wahyuni, P. (2021). Ideologi media dan framing pada pemberitaan perusakan rumah ibadah di Kompas dan Republika. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(2), 63–82.
- Nasution, N. R. (2023). Retorika: Dari filsafat Yunani menuju komunikasi dakwah modern. *Prophetica: Scientific and Research Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, 7(2), 51–62.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/prophetica/article/view/49337>
- Pirmansyah, B. (2024). Analisis dampak framing berita konflik antara Kementerian Agama dan DPR-RI mengenai tambahan kuota haji 2024. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(3), 2721–2246.
- Ramadoni, M., Kholifah, N., Azhima, N., Saputri, J., & Hidayatullah. (2024). Komunikasi dan media sosial: Analisis framing toleransi agama dan budaya dalam menanggapi kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. *Jurnal Khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 6(2), 223–235.
- Sinaga, E. H., Simatupang, M. N., & Wibowo, M. D. (2025). Pemberitaan penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon oleh Kompas.com dan Detik.com dalam bingkai framing Robert Entman. *Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 14(2), 250–268.
- Yoedtadi, M. G. (2025). Peace journalism in the 2023 Bitung ethno-religious clashes. *Kajian Jurnalisme*, 9(1), 17–29.

**This page belongs to
Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora**